

**EVALUASI PENINGKATAN INDEKS INOVASI DAERAH KOTA  
BANDARLAMPUNG PADA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023-2024**

**(Skripsi)**

**OLEH**

**DWI MULYANTI  
NPM 2216021107**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**EVALUASI PENINGKATAN INDEKS INOVASI DAERAH KOTA  
BANDARLAMPUNG PADA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023-2024**

**Oleh**

**DWI MULYANTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PENINGKATAN INDEKS INOVASI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PADA BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023-2024**

**OLEH**  
**Dwi Mulyanti**

Penelitian ini mengkaji peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung periode 2023–2024 dengan fokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai koordinator inovasi daerah. Urgensi penelitian didasarkan pada peningkatan skor IID Kota Bandar Lampung dari 70,33 pada tahun 2023 menjadi 72,07 pada tahun 2024, namun tidak diikuti kestabilan peringkat nasional yang menurun dari peringkat 6 menjadi 13. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan skor belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi kualitas inovasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi data. Fokus penelitian meliputi kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan peningkatan IID, serta capaian hasil inovasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek context, kebijakan peningkatan IID telah memiliki arah strategis dan regulasi yang jelas serta mengalami perubahan orientasi dari kuantitas menuju kualitas inovasi. Pada aspek input, dukungan regulasi, anggaran, sarana prasarana, dan sistem informasi telah tersedia, namun kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman indikator IID masih belum merata. Pada aspek process, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, verifikasi, dan monitoring berbasis aplikasi Sinovak telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat kendala pada kualitas dokumentasi dan kesesuaian bukti dukung inovasi. Pada aspek product, peningkatan skor IID menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan inovasi daerah, meskipun belum diikuti stabilitas peringkat nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan IID Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun belum optimal secara substantif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas dokumentasi inovasi, serta evaluasi internal yang lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah.

**Kata kunci: Indeks Inovasi Daerah, evaluasi kebijakan, model CIPP, inovasi daerah, kinerja inovasi pemerintah daerah.**

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF THE IMPROVEMENT OF THE REGIONAL INNOVATION INDEX OF BANDAR LAMPUNG CITY AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING, RESEARCH, AND INNOVATION AGENCY (BAPPERIDA) OF BANDAR LAMPUNG CITY, 2023–2024**

**BY**  
**Dwi Mulyanti**

This study examines the improvement of the Regional Innovation Index (Indeks Inovasi Daerah/IID) of Bandar Lampung City during the 2023–2024 period, focusing on the role of the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) as the regional innovation coordinator. The urgency of this study is based on the increase in the IID score of Bandar Lampung City from 70,33 in 2023 to 72,07 in 2024, which was not accompanied by stable national rankings, declining from 6th place to 13th place. This condition indicates that the increase in scores has not fully reflected the optimization of regional innovation quality. This study employed a qualitative descriptive approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using thematic analysis and data triangulation techniques. The research focused on policy suitability, resource readiness, implementation of IID improvement, and the achievement of regional innovation outcomes. The findings show that in the context aspect, IID improvement policies already had clear strategic directions and regulatory foundations, with a shift in orientation from quantity-based to quality-based innovation. In the input aspect, support in terms of regulations, budget, infrastructure, and information systems was available; however, human resource capacity and understanding of IID indicators were still uneven. In the process aspect, socialization, assistance, verification, and monitoring through the Sinovak application had been implemented quite well, although challenges remained regarding documentation quality and the suitability of supporting evidence. In the product aspect, the increase in IID scores indicated improvements in regional innovation management, although it was not followed by stable national rankings. This study concludes that the improvement of the IID in Bandar Lampung City has shown progress but has not yet reached substantive and sustainable optimization. Therefore, strengthening human resource capacity, improving innovation documentation quality, and conducting more systematic internal evaluations are necessary to enhance the quality of regional innovation.

**Keywords: Regional Innovation Index, policy evaluation, CIPP model, regional innovation, local government innovation performance.**

Judul skripsi

**:EVALUASI PENINGKATAN INDEKS  
INOVASI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA  
BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023-2024**

Nama Mahasiswa

**: Dwi Mulyanti**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2216021107**

Jurusan

**: Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

**: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



2.Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

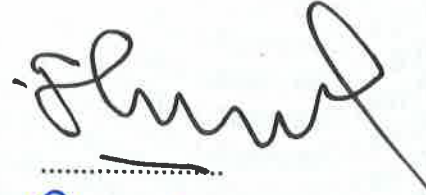
Dr. Tabah Maryanah M.Si.  
NIP. 197106042003122001

The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Dr. Tabah Maryanah M.Si.' and the NIP number 'NIP. 197106042003122001' are printed.

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Prof . Dr. Syarief Makhya M.Si.



Penguji Utama : Darmawan Purba S.I.P.,M.I.P



2. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal S.Sos., M.Si.  
NIP. 197608212000032001

Tanggal lulus ujian skripsi: 6 Mei 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Dwi Mulyani  
NPM. 2216021107

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Mulyanti, Lahir di teluk betung bandar lampung pada 04 juni 2004, yang merupakan putri kedua dari pasangan bapak herna sabirin dan ibu jarsiah. Penulis berbangsa indonesia dan beragama islam.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dengan jenjang yakni;

1. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Sukamaju Teluk Betung Timur Bandar Lampung 2018
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di Smp Negeri 6 Bandar Lampung Pada Tahun 2018
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Sma Negeri 11 Bandar Lampung Pada 2022

Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti unit kegiatan mahasiswa fakultas bernama Spec (social polytical english club) di tahun 2023. Pada tahun 2024 penulis kembali mengikuti program magang yang diinisiasikan oleh HMJ Ilmu Pemerintahan, pada divisi Komunikasi dan informasi selama 3 bulan. Penulis melaksanakan Praktik kerja lapangan (PKL) di BAPPERIDA kota Bandar lampung selama 6 bulan. Saat ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi peningkatan indeks inovasi daerah kota bandar lampung pada bapperida kota bandar lampung tahun 2023-2024"

## MOTTO

“Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

(QS. Al-Anfal: 40)

“ Teman, terasa percuma, Hidup hanya awal tinggalkan dunia  
Berhentilah mengeja dan mulailah membaca, Yang kau tulis dalam cerita”

(360)

“*The struggle was silent, but the growth was loud.* Tidak semua orang tahu  
seberapa keras proses yang dijalani, karena beberapa perjuangan memang  
diciptakan untuk dirasakan, bukan dipamerkan.”

(Dwi)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim Allhamdulillah rabbi'l Alamin

Puji syukur kehadiran allah swt atas berkat rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Keluargaku

Bapak Herna Sabirin dan Ibu Jarsiah, Kakakku Okta Rio Pratama, serta Nenek Dan Kakekku.

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan, didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran serta doa yang tiada henti yang senantiasa mengiringi langkahku.

Para Pendidik Dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan serta ilmunya yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Sahabat Sahabatku

Terimakasih untuk semua hari hari yang penuh warna, terimakasih selalu ada disaat suka dan duka, semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya.

**Almamater Tercinta**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

## SANWANCANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung Pada Bapperida Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2024”**. Shalawat beserta salam tetap tersanjung agungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa salam*.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kemudahan, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada kekuatan dan kemampuan selain atas izin dan kehendak-Nya. Setiap proses yang dilalui, setiap kesulitan yang dihadapi, hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan merupakan bentuk kasih sayang dan pertolongan Allah SWT yang tidak pernah terputus.
2. Penulis juga mempersembahkan rasa terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada Kedua Orang Tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, perhatian, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk penulis. Segala pencapaian dalam hidup penulis tidak terlepas dari peran dan perjuangan kedua orang tua yang selalu percaya dan mendampingi dalam setiap proses kehidupan.

3. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta doa kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
4. Rektor, Wakil Rektor dan Segenap Pimpinan Serta Tenaga Kerja Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal S.Sos., M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan S.I.P.,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Bapak prof. Dr Syarief Makhya M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada bapak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing penulis mulai dari awal hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak Darmawan Purba S.I.P.,M.I.P selaku Dosen Penguji dalam skripsi ini, terimakasih banyak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran sarannya untuk penulis agar karya tuis ini menjadi lebih baik.

10. Sahabat terbaikku Anisa Syevilla dan Yadi, yang selalu kebersamai penulis dalam masa penyusunan skripsi, yang turut merayakan tiap tiap tahap penyelesaian studi ini, Terimakasih atas kebaikannya.
11. Staf dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi di Bapperida Kota Bandar Lampung yang senantiasa membantu dan memudahkan penulis dalam perolehan informasi dan terimakasih atas pengalaman magang yang luar biasa.
12. Teman teman PKL dari Institut Tekonogi Sumatera, Zara, Devi, Amey, dan Sasya yang juga turut memberikan pengalaman magang yang seru dan menyenangkan serta membantu beberapa kesulitan selama proses penyusunan skripsi, terimakasih sudah selalu hadir di tiap pelaksanaan dalam proses penyelesaian studi penulis.
13. Teman teman semasa berkuliah sejak masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, Crisanti Junia Sari dan Serli Yustiana, terimakasih sudah selalu kebersamai penulis sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini.
14. Teman teman KKN Karang Tanjung serta Ibu bapak di tempat KKN, terimakasih banyak atas pengalaman KKN dan hidup bersama yang sangat bermakna dan tidak terlupakan, Teruntuk Ibu, Bapak, Keliv dan juga Mamas, Terimakasih atas bantuan dan kesempatannya menjadi bagian dari keluarga kalian selama kurang lebih 40 hari, penulis sangat bersyukur dan bahagia atas pengalamannya.
15. Terimakasih kepada Ibu Jumaiyah Dan Ibu Asmiyati yang selalu mendukung memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliah, terimakasih atas segala doa, dukungan, serta kebahagiaan yang turut diberikan kepada penulis.

16. Kepada adik adik kecilku Fani, Bila, Mayka, Nada, Almira yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis dan memberikan kebahagiaan dirumah.

17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah mau membantu dan memberikan dukungan dalam proses penulisan hingga saat ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2026  
Penulis

Dwi Mulyanti

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Tentang Evaluasi Program.....	9
2.1.1 Definisi Evaluasi .....	9
2.1.2 Tahap Proses Evaluasi .....	13
2.1.3 Tujuan Evaluasi Program.....	14
2.1.4 Karakteristik Evaluasi Program .....	16
2.1.5 Model Evaluasi Program.....	17
2.2 <i>CIPP Evaluation Model</i> .....	21
2.2.1 Relevansi Model CIPP dengan Penelitian .....	23
2.3 Inovasi Daerah.....	24
2.3.1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Inovasi Daerah.....	27

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Daerah.....	34
2.3.3 Hambatan dan Tantangan Inovasi Daerah .....	36
2.4 Kerangka Pemikiran Teoretis.....	39
<b>III .METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.4 Fokus Penelitian .....	48
3.5 Informan Penelitian .....	48
3.6 Jenis dan Sumber Data .....	51
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.8 Teknik Analisis Data.....	53
3.9 Teknik Keabsahan Data .....	54
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	55
4.1.1 Perubahan Nomenklatur dari Bappeda menjadi BAPPERIDA.....	56
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPERIDA Setelah Perubahan Nomenklatur.....	57
4.1.3 Struktur Organisasi BAPPERIDA .....	58
4.1.4 Konteks Strategis dan Relevansi Penelitian .....	59
4.1.5 Gambaran Umum Indeks Inovasi Daerah .....	60
4.2 Hasil Penelitian .....	72
4.2.1 Kebijakan dan Strategi pemerintah daerah dalam peningkatan indeks inovasi daerah .....	72
4.2.2 Hasil Evaluasi Menggunakan Model CIPP.....	74
4.3 Analisis Pembahasan.....	82
4.3.1 Analisis Pembahasan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023–2024.....	82
4.4 Implikasi Hasil Evaluasi terhadap Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung.....	89
4.4.1 Analisis Faktor Pendukung.....	92
4.4.2 Analisis Faktor Penghambat.....	95

4.5 Analisis Inovasi Unggulan.....	98
4.5.1 Evaluasi Inovasi SIPANDU dan SILAJIS.....	99
4.5.2 Evaluasi Inovasi PILLING.....	101
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
5.1 Simpulan .....	104
5.2 Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>
<b>NAMA INOVASI TAHUN 2023-2024.....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 . Skor IID Provinsi Lampung .....	3
Tabel 2. Skor IID Kota Bandar Lampung .....	4
Tabel 3. Informan Penelitian.....	50
Tabel 4 . Capaian IID Kota Bandar Lampung tahun 2023 .....	63
Tabel 5 . Peraih IGA Kota Bandar Lampung tahun 2023 .....	63
Tabel 6 . OPD Peraih Skor Inovasi Tertinggi .....	64
Tabel 7 . OPD Peraih Total skor inovasi tertinggi .....	64
Tabel 8 . kecamatan Peraih Skor Inovasi Tertinggi .....	64
Tabel 9 . kelurahan Peraih TotalSkor Inovasi Tertinggi .....	65
Tabel 10 . puskesmas Peraih Total Skor Inovasi Tertinggi .....	65
Tabel 11 . SLTP Negeri peraih total skor tertinggi .....	65
Tabel 12 . Capaian IID Kota Bandar Lampung tahun 2024.....	68
Tabel 13 . OPD Peraih Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024 .....	68
Tabel 14 . OPD Peraih Total Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024.....	68
Tabel 15 . Kecamatan Peraih Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024 .....	68
Tabel 16 . Kecamatan Peraih Total Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024.....	68
Tabel 17 . Kelurahan Peraih Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024 .....	68
Tabel 18 . Kelurahan Peraih Total Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024.....	69
Tabel 19 . Puskesmas Peraih Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024 .....	69
Tabel 20 . Puskesmas Peraih Total Skor Inovasi Tertinggi Tahun 2024.....	69
Tabel 21 . SLTP Negeri Peraih Skor Inovasi Tertinggi .....	69
Tabel 22. SLTP Negeri peraih total skor inovasi tertinggi .....	69
Tabel 23. Faktor pengaruh IID .....	83
Tabel 24. Klasifikasi Indikator IID kedalam model CIPP... ..	85
Tabel 25 .Persentase proporsi IID berdasarkan model CIPP .....	86

Tabel 26. Analisis selisih proporsional CIPP.....89

Tabel 27. Faktor pendukung.....92

Tabel 28. Faktor Penghambat.....96

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 1 . Kerangka Pikir Penelitian .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 . Surat Disposisi Wawancara .....	125
Gambar 2 . Surat Izin Riset .....	126
Gambar 3 . Surat Permohonan Izin Riset .....	127
Gambar 4 . Wawancara Bersama Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Bapperida .....	128
Gambar 5 . Wawancara Bersama Staf Pelaksana Teknis Bidang Riset Dan Inovasi Bapperida.....	128
Gambar 6 . Dokumentasi wawancara bersama staf inovasi puskesmas Gedong Air .....	129
Gambar 7 . Wawancara Bersama Staf Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung .....	129

## DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPERIDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BSKDN	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
<i>CIPP</i>	: <i>Context, Input, Process, Product</i>
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<i>GII</i>	: <i>Global Innovation Index</i>
<i>IGA</i>	: <i>Innovative Government Award</i>
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IoT	: Internet of Things
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KOMINFO	: Komunikasi dan Informatika
NPM	: New Public Management
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PKL	: Praktik Kerja Lapangan
POMRI	: Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDa	: Sistem Inovasi Daerah
SIPEKA	: Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik
SPPIRT	: Sistem Pelayanan Izin dan Pelaporan Industri Rumah Tangga
UNIKOM	: Universitas Komputer Indonesia.

# I .PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan suatu negara, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Secara umum, inovasi dipahami sebagai ide, gagasan, metode, atau praktik baru yang dikembangkan untuk memberikan solusi dan nilai tambah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Everett M. Rogers (1983), inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga mencakup pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem yang telah ada agar menjadi lebih efektif, efisien, dan bermanfaat.

Perkembangan global menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi indikator utama dalam menentukan daya saing suatu negara. Negara yang mampu mengembangkan sistem inovasi secara baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berbagai negara berlomba-lomba memperkuat ekosistem inovasi melalui pengembangan riset, teknologi, sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi suatu negara adalah Global Innovation Index (GII) yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization. GII menilai kinerja inovasi berdasarkan berbagai indikator, seperti kelembagaan, sumber daya manusia dan penelitian, infrastruktur, kecanggihan pasar, kecanggihan bisnis, hingga output inovasi berupa teknologi dan kreativitas.

Keberadaan indeks ini menjadi acuan penting bagi negara-negara dalam mengevaluasi sistem inovasi nasional serta menentukan arah kebijakan pembangunan berbasis inovasi. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia dalam Global Innovation Index menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indonesia berhasil meningkatkan peringkat dari posisi ke-85 pada tahun 2020 menjadi peringkat ke-54 dunia pada tahun

2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan sistem inovasi nasional melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kolaborasi riset dan inovasi. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengintegrasikan pengelolaan riset nasional agar lebih terarah dan efisien. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan inovasi.

Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Switzerland, Sweden, dan United States, kapasitas inovasi Indonesia masih tergolong menengah. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan investasi riset dan pengembangan, jumlah peneliti yang masih sedikit, serta belum optimalnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar berupa jumlah penduduk yang tinggi, perkembangan teknologi digital yang pesat, serta keberagaman sumber daya yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan inovasi.

Dalam konteks pemerintahan, inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Inovasi daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghadirkan berbagai terobosan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan inovasi pemerintah daerah berdasarkan aspek input, proses, dan output inovasi. Penilaian ini tidak hanya menitikberatkan pada jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi juga kualitas inovasi, seperti unsur kebaruan, manfaat, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, IID juga menjadi dasar dalam pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada daerah-daerah dengan kinerja inovasi terbaik.

Dalam konteks daerah, Lampung menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan perkembangan inovasi daerah yang cukup baik. Berdasarkan data pemerintah daerah, capaian IID Provinsi Lampung mengalami perkembangan yang dinamis dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan skor IID Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Skor iid Provinsi Lampung

<b>Tahun</b>	<b>Skor IID</b>	<b>Kategori</b>
<b>2020</b>	14,599	Sangat Inovatif
<b>2021</b>	50,18	Inovatif
<b>2022</b>	60,9	Sangat Inovatif
<b>2023</b>	58,7	Inovatif
<b>2024</b>	65,50	Sangat Inovatif

Sumber: Satu Data Lampung

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa capaian IID Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, skor IID Provinsi Lampung tercatat sebesar 14,599 dengan kategori sangat inovatif. Selanjutnya, pada tahun 2021 skor meningkat menjadi 50,18 dengan kategori inovatif. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan skor sebesar 60,9 dan masuk dalam kategori sangat inovatif. Namun, pada tahun 2023 skor mengalami sedikit penurunan menjadi 58,7 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,50 dengan kategori sangat inovatif. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Berbagai inovasi yang dikembangkan di Provinsi Lampung mencakup inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung inovasi, seperti penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, penyediaan anggaran, serta pembinaan kepada perangkat daerah. Bahkan pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil memperoleh penghargaan Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi daerah di Provinsi Lampung mendapatkan pengakuan secara nasional.

Namun demikian, pengembangan inovasi daerah di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain rendahnya kualitas inovasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, keterbatasan sumber daya

manusia, tingginya pergantian pegawai, serta kurang lengkapnya data pendukung inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah inovasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas inovasi.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang aktif melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah, capaian IID Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan skor dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan skor dan peringkat IID Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Skor iid Kota Bandar Lampung

<b>Tahun</b>	<b>Skor</b>	<b>Peringkat</b>
<b>2021</b>	50,07	40
<b>2022</b>	57,17	23
<b>2023</b>	70,33	6
<b>2024</b>	72,07	13

Sumber: SE IID Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa skor Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Kota Bandar Lampung memperoleh skor sebesar 50,07 dan berada pada peringkat 40 nasional. Selanjutnya pada tahun 2022, skor meningkat menjadi 57,17 dengan kenaikan peringkat ke posisi 23 nasional. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan skor mencapai 70,33 dan berhasil menempatkan Kota Bandar Lampung pada peringkat 6 nasional. Kemudian pada tahun 2024 skor kembali meningkat menjadi 72,07, namun peringkat nasional mengalami penurunan menjadi posisi 13.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan skor inovasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan daya saing daerah dibandingkan wilayah lain. Dengan kata lain, meskipun jumlah dan nilai inovasi meningkat, kualitas dan keberlanjutan inovasi masih menjadi tantangan dalam mempertahankan posisi Kota Bandar Lampung pada tingkat nasional. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan kuantitas inovasi dengan kualitas inovasi yang dihasilkan. Sebagai upaya memperkuat pengelolaan inovasi, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan perubahan kelembagaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan memperkuat fungsi riset dan inovasi agar pengelolaan inovasi daerah menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain

itu, pemerintah daerah juga menggunakan Sistem Informasi Inovasi Kota Bandar Lampung (Sinovak 3.0) sebagai sarana pengelolaan dan pelaporan inovasi perangkat daerah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, capaian IID Kota Bandar Lampung yang masih fluktuatif menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan, sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil inovasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan IID serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Meskipun capaian skor IID mengalami peningkatan setiap tahun, kondisi tersebut belum diikuti dengan kestabilan peringkat nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan inovasi secara kuantitas belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas dan daya saing inovasi daerah. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Penelitian ini juga menjadi penting karena inovasi daerah saat ini tidak hanya dipandang sebagai program administratif, tetapi telah menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, adanya perubahan kelembagaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah. Namun demikian, efektivitas perubahan kelembagaan tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan inovasi.

Selain itu, masih ditemukannya berbagai kendala seperti rendahnya kualitas inovasi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya keberlanjutan inovasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan inovasi daerah. Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka inovasi daerah berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kinerja

pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2023–2024 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan inovasi daerah di Kota Bandar Lampung serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas inovasi daerah secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, meskipun otonomi daerah dan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID) telah mendorong peningkatan kinerja inovasi di daerah, capaian IID Kota Bandar Lampung masih menunjukkan fluktuasi dan belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola inovasi, seperti kesiapan kelembagaan, kualitas pelaporan, koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas peran Bapperida sebagai koordinator inovasi. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan, berangkat dari permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Bapperida Kota Bandar Lampung pada periode 2023–2024?
2. Bagaimana hasil evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah di Bapperida Kota Bandar Lampung jika dianalisis melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) pada periode 2023–2024.

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menilai peningkatan indeks inovasi daerah dalam kurun waktu 2023-2024.

2. Untuk Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian IID Kota Bandar Lampung pada periode 2023–2024, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan teknologi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat sebagai cermin bagi Bapperida Kota Bandar Lampung untuk melihat seberapa efektif strategi peningkatan Indeks Inovasi Daerah yang dijalankan. Bagi dunia akademik, riset ini menunjukkan bagaimana teori evaluasi CIPP bisa diterapkan langsung pada praktik birokrasi, bukan sekadar konsep di buku. Dan bagi masyarakat, manfaatnya adalah peluang hadirnya pelayanan publik yang tidak hanya sekadar inovatif di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak lain, seperti:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam bidang evaluasi program inovasi daerah melalui penerapan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai instrumen evaluatif yang komprehensif, mencakup penilaian terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil inovasi di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang melakukan kajian serupa mengenai strategi peningkatan inovasi daerah di berbagai pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya yang mengintegrasikan pendekatan evaluatif berbasis model CIPP.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Bapperida Kota Bandar Lampung, penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan yang

lebih adaptif terhadap dinamika peningkatan inovasi daerah, memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, serta mengoptimalkan peran Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam pengelolaan dan pelaporan IID.

2. Bagi pemerintah daerah secara luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman tentang peran inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Evaluasi Program

#### 2.1.1 Definisi Evaluasi

Secara etimologis, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran (Dharma, 2000:220). Kata ini berakar dari kata *value* yang memiliki arti nilai. Oleh karena itu, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu objek atau kegiatan. Dalam praktiknya, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi itu sendiri. Tanpa adanya evaluasi, sulit untuk mengetahui kondisi suatu objek yang dievaluasi, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Menurut Mehrens dan Lehmann (1978), evaluasi merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, serta penyediaan informasi yang sangat diperlukan sebagai dasar dalam menentukan berbagai alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan rasional.

Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, evaluasi dipandang sebagai suatu proses sistematis dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai suatu kegiatan atau program. Dalam konteks analisis kebijakan, evaluasi memiliki makna yang berkaitan dengan penerapan berbagai ukuran nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang dilaksanakan. Secara umum, istilah evaluasi sering disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian nilai (*rating*), dan penilaian (*assessment*),

yang semuanya mengacu pada upaya untuk menganalisis hasil kebijakan berdasarkan nilai tertentu.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berfokus pada penyediaan informasi mengenai nilai dan manfaat dari suatu hasil kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan memiliki nilai apabila hasil yang dicapai mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila suatu program atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak yang nyata, maka program tersebut dapat dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan yang menjadi dasar perumusan program telah dapat dijelaskan atau bahkan diatasi (Dunn, 2000).

Anderson (1987:7) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas fungsional pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan itu sendiri. Hal ini karena para pembuat kebijakan maupun administrator secara terus-menerus melakukan penilaian terhadap keberhasilan serta dampak dari kebijakan, program, maupun proyek yang telah dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut, Kifer (1995) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui nilai atau manfaat (*worth*) dari suatu program, produk, prosedur, atau proyek. Sementara itu,

Selanjutnya, Daniel L. Stufflebeam (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses yang melibatkan kegiatan menggambarkan, mencari, serta menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif kebijakan. Evaluasi juga dipahami sebagai proses untuk menilai hasil yang telah dicapai dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan guna mendukung pencapaian tujuan. Data dan laporan yang dihasilkan dari evaluasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, evaluator dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) agar proses evaluasi berjalan optimal.

Suatu kebijakan atau program dapat dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna apabila mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, evaluasi menjadi sangat penting, terutama dalam jangka panjang, guna menjamin keberlanjutan (*sustainability*) suatu program. Melalui evaluasi, kebijakan yang akan datang dapat disusun dengan lebih baik serta dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama.

Adapun beberapa alasan penting dilakukannya evaluasi antara lain: pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, untuk menentukan apakah suatu kebijakan dapat dikategorikan berhasil atau gagal berdasarkan tingkat pencapaiannya. Ketiga, untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik, di mana hasil evaluasi menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat sekaligus penyedia sumber daya. Keempat, untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai manfaat dari suatu kebijakan atau program, sehingga mereka dapat memahami dampak yang dihasilkan. Kelima, sebagai upaya pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali dalam perumusan kebijakan di masa mendatang, serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Mehrens dan Lehmann (1978:5) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, serta penyediaan informasi yang sangat diperlukan dalam menentukan berbagai alternatif keputusan. Pengertian ini menegaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dirancang secara sengaja untuk memperoleh data yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Daniel L. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu penyelidikan sistematis terhadap nilai suatu objek. Secara operasional, evaluasi mencakup proses perencanaan, pengumpulan, pelaporan, serta penggunaan informasi deskriptif dan penilaian untuk

menentukan manfaat, signifikansi, dan kualitas suatu objek. Evaluasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, memperluas praktik yang efektif, serta memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

Menurut Sudjana (2008), evaluasi merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap program yang sedang atau telah dilaksanakan. Hasil dari evaluasi berupa penilaian terhadap program, seperti apakah program tersebut bermanfaat atau tidak, berhasil atau tidak, serta layak untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

### **A. Jenis Evaluasi**

Dalam praktiknya evaluasi dibedakan menjadi dua jenis:

1. Evaluasi Formatif,. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan selama program masih berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat dilakukan sebelum program berjalan, saat program berlangsung, maupun setelah program selesai dalam skala terbatas. Evaluasi formatif berfungsi untuk mendeteksi berbagai kendala dan ketidakefisienan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu, evaluasi ini juga menghasilkan data jangka pendek (*short-term data*) yang berguna untuk memantau perkembangan program secara berkala.
2. Evaluasi Sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan program untuk menilai hasil secara keseluruhan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas program secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan program, apakah akan dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dan dampak program telah dapat diidentifikasi secara jelas.

Secara keseluruhan, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta penyediaan informasi terhadap suatu program atau kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuannya melalui pengumpulan data secara sistematis, analisis, serta pemberian rekomendasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.2 Tahapan Pada Proses Evaluasi Program**

Evaluasi program merupakan salah satu bentuk evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk menilai pelaksanaan suatu program secara menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan program tersebut.

Menurut Wirawan (2011:17), program merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu maupun berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap program perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah layanan atau intervensi yang diberikan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi program sendiri dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi guna menjawab berbagai pertanyaan mendasar terkait pelaksanaan program. Evaluasi program dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi hasil (*outcome evaluation*), dan evaluasi dampak (*impact evaluation*).

Menurut Daniel L. Stufflebeam (2007), evaluasi program merupakan suatu upaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Evaluasi juga dipahami sebagai proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai. Selain itu, evaluasi program merupakan kegiatan penetapan nilai, efektivitas, serta kesesuaian suatu program dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui proses yang sistematis.

Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan standar atau kriteria tertentu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi program. Rossi dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013:269) mengemukakan empat hal utama, yaitu: (1) identifikasi kelompok sasaran penerima manfaat program, termasuk karakteristik dan lokasi mereka; (2) penentuan metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan program; (3) kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan; serta (4) peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

Selain itu, keberhasilan suatu program juga dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara material maupun nonmaterial; terlaksananya program sesuai dengan rencana yang telah disusun; ketepatan sasaran program terhadap kelompok yang dituju; serta tercapainya tujuan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Indikator-indikator ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana program dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, evaluasi program dapat dipahami sebagai suatu proses pengujian yang dilakukan secara objektif melalui pengukuran dan analisis sistematis terhadap pelaksanaan program. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah perbaikan maupun kebijakan di masa yang akan datang.

### **2.1.3 Tujuan Evaluasi Program**

Evaluasi program dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan dan hasil suatu program. Menurut Endang Mulyatiningsih (2011:114–115), evaluasi program bertujuan untuk mengetahui kontribusi program terhadap pencapaian tujuan organisasi

serta sebagai dasar dalam menentukan keberlanjutan program, apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Secara umum, evaluasi program juga dapat dipahami sebagai bentuk penelitian evaluatif, karena bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu objek secara sistematis. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:7), terdapat perbedaan antara penelitian dan evaluasi program, di mana penelitian berfokus pada deskripsi suatu fenomena, sedangkan evaluasi program lebih menekankan pada penilaian terhadap tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan kriteria tertentu.

Weiss (1972) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi program antara lain untuk menerapkan metode penelitian, menilai hasil program, menggunakan kriteria tertentu sebagai dasar penilaian, serta memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Sementara itu, Kirkpatrick (1998) menyatakan bahwa evaluasi program penting untuk menunjukkan efektivitas penggunaan sumber daya, menentukan keberlanjutan program, serta mengumpulkan informasi sebagai dasar pengembangan program di masa depan.

Selain itu, Scriven membedakan tujuan evaluasi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program yang sedang berjalan, sedangkan fungsi sumatif digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dasar dalam pengambilan keputusan terkait kelanjutan program.

Mutrofin (2010:157) menyatakan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk memperoleh informasi yang berguna dalam memilih alternatif kebijakan atau program yang paling tepat untuk mencapai tujuan sosial. Sementara itu, Tayibnapi (2000:59) menekankan bahwa evaluasi juga bertujuan untuk menyediakan informasi bagi berbagai pihak, seperti manajer, pembina, klien, maupun pemberi dana.

Sukmadinata (2006:121) menjelaskan bahwa evaluasi program bertujuan untuk membantu perencanaan program, menentukan perbaikan atau perubahan program, menilai keberlanjutan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memahami berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan program.

Lebih lanjut, Purwanto dan Suparman (1999) menyatakan bahwa evaluasi program memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengkomunikasikan hasil program kepada masyarakat, menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, menyempurnakan pelaksanaan program, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui evaluasi, masyarakat dapat memahami manfaat program dan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangannya.

#### **2.1.4 Karakteristik Evaluasi Program**

Evaluasi program memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), terdapat beberapa karakteristik evaluasi program, antara lain dilakukan secara sistematis, menggunakan standar atau kriteria tertentu sebagai acuan, serta bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Evaluasi program juga memandang program sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan identifikasi terhadap komponen dan indikator program secara rinci agar dapat diketahui bagian mana yang menjadi kelemahan maupun kelebihan program. Selain itu, hasil evaluasi harus mampu menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindak lanjut program.

### 2.1.5 Model Evaluasi Program

Dalam pelaksanaan evaluasi program, terdapat berbagai model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan, karakteristik, serta fokus kajian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut muncul karena setiap program memiliki tujuan, kondisi, dan kebutuhan evaluasi yang tidak sama, sehingga model evaluasi yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks program yang diteliti. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, pada dasarnya seluruh model evaluasi memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh informasi yang akurat, sistematis, dan objektif mengenai pelaksanaan suatu program sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, serta perbaikan program di masa mendatang. Menurut Eko Putro Widoyoko, model evaluasi merupakan desain atau kerangka evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi dan biasanya dinamakan sesuai dengan nama pengembangnya atau tahapan evaluasi yang digunakan. Dalam praktiknya, pemilihan model evaluasi dapat dilakukan secara eklektik, yaitu memilih model evaluasi yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan tujuan penelitian agar hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan komprehensif (Widoyoko, 2017).

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Capi Safruddin Abdul Jabar (2009:40), terdapat beberapa model evaluasi program yang banyak digunakan dalam penelitian dan evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ralph Tyler yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Capi Safruddin Abdul Jabar (2009), Goal Oriented Evaluation Model merupakan model evaluasi yang berfokus pada ketercapaian tujuan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelebihan model ini adalah indikator evaluasi jelas dan mudah diterapkan, sedangkan kelemahannya terlalu berorientasi pada tujuan formal sehingga kurang memperhatikan proses program.
2. Menurut Michael Scriven yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Capi

Safuruddin Abdul Jabar (2009), Goal Free Evaluation Model menilai program berdasarkan dampak nyata di lapangan tanpa berfokus pada tujuan formal program. Kelebihan model ini adalah mampu menemukan dampak yang tidak direncanakan, sedangkan kelemahannya evaluator dapat kesulitan menentukan batas evaluasi.

3. Menurut Michael Scriven yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safuruddin Abdul Jabar (2009), Formative-Summative Evaluation Model membagi evaluasi menjadi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program saat berjalan, sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk menilai hasil akhir program. Kelebihan model ini adalah dapat membantu perbaikan program secara berkelanjutan, sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu evaluasi yang lebih panjang.
4. Menurut Robert Stake yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safuruddin Abdul Jabar (2009), Countenance Evaluation Model menekankan evaluasi pada aspek antecedents, transactions, dan outcomes. Kelebihan model ini adalah mampu menggambarkan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program secara menyeluruh, sedangkan kelemahannya memerlukan data dan analisis yang cukup kompleks.
5. Menurut Robert Stake yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safuruddin Abdul Jabar (2009), Responsive Evaluation Model berfokus pada pengalaman dan kebutuhan stakeholders dalam pelaksanaan program. Kelebihan model ini adalah mampu menggambarkan kondisi program secara realistis, sedangkan kelemahannya hasil evaluasi cenderung subjektif.
6. Menurut Marvin Alkin yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safuruddin Abdul Jabar (2009), CSE-UCLA Evaluation Model digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam manajemen program. Model ini mengevaluasi program mulai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Kelebihan model ini adalah informasi evaluasi yang dihasilkan cukup

lengkap, sedangkan kelemahannya membutuhkan proses evaluasi yang panjang.

7. Menurut Daniel Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), CIPP Evaluation Model terdiri atas empat komponen, yaitu Context, Input, Process, dan Product. Model ini digunakan untuk mengevaluasi program secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil program. Kelebihan model ini adalah evaluasinya komprehensif, sedangkan kelemahannya membutuhkan data yang cukup banyak.
8. Menurut Malcolm Provus yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), Discrepancy Evaluation Model berfokus pada identifikasi kesenjangan antara standar program dengan kondisi nyata pelaksanaan program. Kelebihan model ini adalah efektif untuk pengawasan mutu program, sedangkan kelemahannya lebih berfokus pada kekurangan program dibandingkan pengembangannya secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai model evaluasi tersebut, penelitian ini menggunakan model CIPP karena dinilai paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung periode 2023–2024 secara komprehensif. Model CIPP dipilih karena mampu memberikan gambaran evaluasi yang menyeluruh mulai dari analisis kebutuhan dan arah kebijakan inovasi daerah (*context*), kesiapan sumber daya, regulasi, serta strategi pelaksanaan (*input*), mekanisme pengelolaan dan verifikasi inovasi (*process*), hingga capaian hasil inovasi daerah berupa skor dan peringkat IID (*product*).

Selain itu, model CIPP dinilai lebih relevan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa peningkatan skor IID, tetapi juga ingin mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, serta hubungan sebab–akibat antar komponen yang memengaruhi peningkatan IID Kota Bandar Lampung. Melalui model CIPP, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terintegrasi sehingga mampu menghasilkan

rekomendasi perbaikan kebijakan inovasi daerah secara lebih tepat dan komprehensif. Dengan demikian, model CIPP dianggap paling mampu menjawab kebutuhan penelitian dalam menganalisis proses peningkatan IID Kota Bandar Lampung secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga hasil akhir yang diperoleh.

## **2.2 CIPP Evaluation Model**

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Istilah CIPP merupakan akronim dari empat komponen utama, yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Keempat komponen tersebut menjadi fokus utama dalam proses evaluasi, yang pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem dalam suatu program. Dengan demikian, model CIPP memandang program sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan harus dievaluasi secara menyeluruh.

Keunikan model CIPP terletak pada keterkaitannya dengan proses pengambilan keputusan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Model ini memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif karena mencakup seluruh tahapan program, mulai dari penentuan konteks hingga hasil yang dicapai. Oleh karena itu, model CIPP dinilai mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan suatu program.

Adapun keempat komponen dalam model CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Context (Konteks)**

Evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, peluang, serta kondisi lingkungan yang melatarbelakangi pelaksanaan program. Melalui evaluasi ini, pembuat kebijakan dapat menetapkan tujuan dan prioritas program secara lebih tepat. Selain itu, evaluasi konteks juga memberikan gambaran mengenai kondisi objektif yang menjadi dasar pelaksanaan program, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

### **2. Input (Masukan)**

Evaluasi input difokuskan pada penilaian terhadap sumber daya dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu dalam menentukan alternatif terbaik dalam penggunaan sumber daya, strategi, serta perencanaan program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

### 3. **Process (Proses)**

Evaluasi proses dilakukan untuk memantau pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

### 4. **Product (Hasil)**

Evaluasi produk bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan program. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Dalam model evaluasi CIPP, keempat komponen tersebut tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga membantu pengambil keputusan dalam menjawab empat pertanyaan mendasar terkait pelaksanaan program. Pertama, pertanyaan mengenai

1. apa yang harus dilakukan (*what should we do?*)
2. bagaimana program dilaksanakan (*how should we do it?*)
3. apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana (*are we doing it as planned?*)
4. apakah program berhasil (*did it work?*)

Model CIPP didasarkan pada pandangan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, tujuan program, sumber daya yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi dengan menggunakan model CIPP tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan seluruh proses yang terjadi dalam pelaksanaan program.

Lebih lanjut, tujuan evaluasi menurut Daniel L. Stufflebeam adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menilai berbagai alternatif keputusan, membantu para pemangku kepentingan dalam memahami serta

meningkatkan manfaat program, serta mendukung pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif di masa yang akan datang.

### **2.2.1 Relevansi Model CIPP dengan Penelitian**

Model CIPP dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena struktur analisisnya sejalan dengan instrumen penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pedoman penilaian IID (Permendagri No. 104 Tahun 2018), aspek yang dinilai mencakup input, proses, dan output/outcome, yang secara konseptual beririsan langsung dengan komponen CIPP.

Komponen Context dalam penelitian ini digunakan untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan tujuan pelaksanaan program peningkatan IID di Bapperida Kota Bandar Lampung. Komponen Input mencakup kesiapan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta regulasi pendukung dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah. Komponen Process menilai sejauh mana program peningkatan IID dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, termasuk mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pemantauan kegiatan inovatif. Terakhir, komponen Product digunakan untuk menilai hasil dan dampak dari peningkatan IID terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi di Kota Bandar Lampung.

Beberapa penelitian terdahulu memperkuat alasan pemilihan model CIPP dalam konteks penelitian evaluasi inovasi. Rahman dkk. (2023) menunjukkan bahwa penerapan model CIPP mampu memberikan hasil evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas program inovasi pelayanan publik di Jawa Barat. Hasil serupa ditemukan oleh Yuliani dan Firmansyah (2024), di mana model CIPP membantu mengidentifikasi keterkaitan antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil inovasi. Dengan demikian, model ini terbukti efektif digunakan dalam menilai keberhasilan program yang bersifat multi-dimensi seperti peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

### 2.3 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola, serta daya saing daerah. Secara etimologis, inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pembaruan atau penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya, baik berupa ide, metode, maupun produk. Dalam perspektif akademik, inovasi didefinisikan oleh Everett M. Rogers (1995) sebagai “an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption,” yang menunjukkan bahwa unsur kebaruan bersifat relatif tergantung pada persepsi penerima inovasi. Sejalan dengan itu, Peter F. Drucker (1985) menyatakan bahwa inovasi merupakan instrumen utama untuk menciptakan nilai dan peluang baru dalam suatu organisasi.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, inovasi daerah secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang mendefinisikan inovasi daerah sebagai segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Hal ini diperkuat oleh berbagai kajian ilmiah yang menyatakan bahwa inovasi daerah merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi (Suwarno, 2008; Muluk, 2008).

Secara lebih spesifik, inovasi daerah dipahami sebagai upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2017). Pendapat ini menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berorientasi pada perubahan administratif, tetapi juga pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih lanjut, Fatoni (2022) menjelaskan bahwa inovasi daerah tidak sekadar menciptakan ide baru, melainkan juga mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengadaptasi kebijakan, teknologi, serta pendekatan pelayanan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, inovasi daerah bersifat kontekstual dan adaptif, serta menuntut adanya fleksibilitas dalam implementasinya.

Dalam kajian jurnal ilmiah, inovasi daerah tidak hanya dipahami sebagai produk akhir, tetapi sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan sumber daya. Menurut Mulgan (2007), inovasi sektor publik merupakan proses penciptaan dan implementasi ide-ide baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Sementara itu, Osborne dan Brown (2011) dalam *Public Management Review* menyatakan bahwa inovasi sektor publik mencakup perubahan dalam struktur organisasi, proses, maupun layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. De Vries, Bekkers, dan Tummers (2016) juga menegaskan bahwa keberhasilan inovasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, serta dukungan lingkungan eksternal.

Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa inovasi daerah sering muncul sebagai respons terhadap permasalahan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat lokal (Pratama, 2020; Wicaksono, 2019). Selain itu, inovasi daerah juga berkaitan erat dengan konsep sistem inovasi daerah (*regional innovation system*) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Cooke (2001) menyatakan bahwa sistem inovasi daerah merupakan jaringan institusi yang berperan dalam menghasilkan dan menyebarkan inovasi pada tingkat regional, sedangkan Asheim dan Gertler (2005) menegaskan bahwa keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh sinergi antar aktor dan dukungan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh ekosistem yang kondusif.

Jenis inovasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Inovasi Produk,
2. Inovasi Proses,
3. Inovasi Organisasi, Dan
4. Inovasi Pelayanan.

OECD (2018) dalam *Oslo Manual* menjelaskan bahwa inovasi produk berkaitan dengan penciptaan barang atau jasa baru, inovasi proses berkaitan dengan perubahan metode kerja, inovasi organisasi berkaitan dengan perubahan praktik manajerial, sedangkan inovasi pemasaran berkaitan dengan strategi penyampaian layanan. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, klasifikasi ini disederhanakan menjadi;

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan,
2. Inovasi Pelayanan Publik, Dan
3. Inovasi Lainnya Sesuai Dengan Kewenangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik menjadi bentuk inovasi yang paling dominan karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat (Yanuar, 2021). Lebih lanjut, inovasi daerah memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perumusan ide, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengembangan atau replikasi inovasi. Tahapan ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1995), yang meliputi tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks sektor publik, Hartley (2005) menegaskan bahwa proses evaluasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan inovasi, sehingga inovasi daerah harus dipandang sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan efektivitas inovasi daerah, diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif. Salah satu model evaluasi yang dapat digunakan adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, yang mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Model ini memungkinkan penilaian yang menyeluruh terhadap pelaksanaan inovasi, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil yang dicapai. Selain itu, dalam konteks Indonesia, evaluasi inovasi daerah juga dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

IID digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah dengan menilai tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output/outcome. Data BSKDN (2024) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 527 pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam penilaian IID, dengan lebih dari 14.000 inovasi yang telah diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi daerah telah menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi serta upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.

Indikator keberhasilan inovasi daerah tidak hanya dilihat dari aspek kebaruan, tetapi juga dari manfaat, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta potensi replikasi di daerah lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Albury (2005) yang menyatakan bahwa inovasi sektor publik harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa inovasi daerah yang berhasil mampu meningkatkan kepuasan masyarakat serta mempercepat proses pelayanan (Sari, 2021). Oleh karena itu, inovasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat reformasi birokrasi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, inovasi daerah dapat dipahami sebagai suatu proses pembaruan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah tidak hanya mencakup penciptaan ide baru, tetapi juga implementasi, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan yang didukung oleh berbagai faktor seperti kepemimpinan, sumber daya, serta lingkungan kebijakan. Dengan demikian, inovasi daerah menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing tinggi.

### **2.3.1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Inovasi Daerah**

Pelaksanaan inovasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya inovasi dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi

Pelayanan Publik memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.

Kemendagri juga menerbitkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan terhadap Inovasi Daerah, yang menetapkan mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Kebijakan ini diperkuat melalui pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) yang diberikan kepada

pemerintah daerah dengan capaian IID tertinggi. Berdasarkan laporan BSKDN (2024), pelaksanaan IID dan IGA telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah inovasi yang terverifikasi dan direplikasi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kebijakan inovasi daerah di Indonesia merupakan salah satu instrumen strategis dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, sehingga inovasi menjadi instrumen penting dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan inovasi daerah tidak dapat dilepaskan dari paradigma *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, inovasi dipahami sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang selama ini cenderung kaku, prosedural, dan lambat dalam merespons kebutuhan publik. Oleh

karena itu, inovasi daerah menjadi sarana transformasi dari pola pemerintahan tradisional menuju pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi maupun kebutuhan riil masyarakat.

Landasan normatif utama kebijakan inovasi daerah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya kreativitas daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lokal, sekaligus memperkuat prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga memberikan ruang diskresi kepada kepala daerah untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Diskresi ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, serta potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat diseragamkan secara nasional. Dengan demikian, inovasi menjadi instrumen fleksibel yang memungkinkan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai aturan turunan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan pengaturan yang lebih teknis dan komprehensif mengenai penyelenggaraan inovasi daerah. Dalam regulasi ini, inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Definisi ini mencakup inovasi dalam aspek kebijakan, kelembagaan, tata kelola, serta pelayanan publik, sehingga menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan sistem dan proses pemerintahan secara menyeluruh.

Tujuan utama dari kebijakan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal birokrasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam implementasinya, kebijakan inovasi daerah berlandaskan pada sejumlah prinsip utama, antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman normatif bagi pemerintah daerah agar setiap inovasi yang dikembangkan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, prinsip tersebut juga memastikan bahwa inovasi yang dilakukan memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.

PP Nomor 38 Tahun 2017 juga menetapkan kriteria inovasi daerah yang harus dipenuhi, yaitu mengandung unsur pembaruan, memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak membebani masyarakat secara berlebihan, serta dapat direplikasi oleh daerah lain. Kriteria ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya dinilai dari aspek kebaruan, tetapi juga dari aspek kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kemungkinan untuk dikembangkan lebih luas.

Kebijakan inovasi daerah juga bersifat inklusif dan partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa usulan inovasi dapat berasal dari kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, aparatur sipil negara, hingga masyarakat. Partisipasi berbagai pihak ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan.

Dalam aspek implementasi, inovasi daerah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu pengusulan, penetapan, uji coba, penerapan, dan evaluasi. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan telah melalui proses yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Tahapan uji coba menjadi salah satu fase paling penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengujian efektivitas inovasi sebelum diterapkan secara luas.

Pada tahap uji coba, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak inovasi yang dikembangkan. Apabila ditemukan kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaan, maka inovasi dapat diperbaiki sebelum diimplementasikan secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovasi daerah bersifat adaptif dan berbasis pembelajaran (*learning process*).

Salah satu aspek penting dalam kebijakan ini adalah adanya perlindungan hukum bagi pelaksana inovasi daerah. PP Nomor 38 Tahun 2017 menegaskan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan inovasi tidak serta merta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, selama inovasi tersebut dilakukan dengan itikad baik, sesuai prosedur, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan ruang yang aman bagi pemerintah daerah untuk melakukan eksperimen kebijakan tanpa takut terhadap risiko hukum yang berlebihan.

Dari sisi pendanaan, inovasi daerah dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa inovasi merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus didukung secara finansial agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Dari aspek kelembagaan, pelaksanaan inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga ini memiliki peran strategis dalam melakukan kajian,

pengembangan, serta evaluasi terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan lembaga ini juga memastikan bahwa inovasi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kebijakan inovasi daerah juga mendorong pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang berfungsi sebagai wadah integrasi berbagai aktor inovasi, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. SIDa berperan sebagai ekosistem inovasi yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Dalam perkembangan kebijakan lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengembangkan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi daerah secara nasional. IID digunakan untuk menilai tingkat inovasi pemerintah daerah berdasarkan tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output/outcome.

Komponen input mencerminkan kesiapan sumber daya dalam mendukung inovasi, komponen proses menggambarkan pelaksanaan inovasi, sedangkan output/outcome menunjukkan hasil dan dampak dari inovasi yang dihasilkan. Dengan demikian, IID memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas inovasi di setiap daerah.

Melalui IID, pemerintah pusat dapat melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kinerja inovasi tinggi, sekaligus memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan. Selain itu, hasil penilaian IID juga digunakan sebagai instrumen pembelajaran bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas inovasi yang mereka kembangkan.

Namun demikian, implementasi kebijakan inovasi daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi inovasi, minimnya dukungan anggaran, serta

lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang sering menghambat pelaksanaan inovasi di daerah.

Selain itu, faktor kepemimpinan juga menjadi determinan utama dalam keberhasilan inovasi daerah. Kepala daerah yang memiliki visi inovatif dan komitmen tinggi terhadap perubahan cenderung mampu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan dapat menyebabkan inovasi tidak berkembang secara optimal.

Konsistensi regulasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan inovasi daerah. Ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan daerah dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan inovasi di lapangan, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan secara berkelanjutan.

Dalam konteks perkembangan global, kebijakan inovasi daerah juga harus mampu merespons tantangan digitalisasi dan transformasi teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di era pemerintahan modern.

Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kecepatan layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Oleh karena itu, inovasi berbasis digital menjadi salah satu arah utama pengembangan inovasi daerah di Indonesia saat ini.

Secara keseluruhan, kebijakan inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 merupakan instrumen strategis dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Kebijakan ini tidak hanya mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, kelembagaan yang efektif, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan, inovasi daerah diharapkan dapat terus berkembang sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

### **2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Daerah**

Keberhasilan pelaksanaan inovasi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Surakarta (2020) menyebutkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan komitmen politik merupakan faktor penentu keberhasilan inovasi. Rahmanda (2023) menambahkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital menjadi penentu penting dalam keberlanjutan inovasi. Bahtiar et al. (2021) menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan ketersediaan anggaran dalam memperkuat pelaksanaan inovasi daerah.

Berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa inovasi daerah merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai faktor yang saling memengaruhi baik dari internal maupun eksternal organisasi pemerintahan. Secara teoritis, inovasi dalam sektor publik dapat dijelaskan melalui teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), yang menekankan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh persepsi keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diuji coba, dan keteramatan hasil inovasi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Damanpour (1991; 1996) menegaskan bahwa struktur organisasi, kompleksitas birokrasi, serta keterbukaan terhadap perubahan menjadi determinan penting dalam keberhasilan inovasi organisasi publik. Faktor kepemimpinan juga menjadi aspek dominan, di mana kepemimpinan transformasional terbukti mampu menciptakan visi inovasi, mendorong motivasi aparatur, serta membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan (Osborne & Brown, 2013; Hartley, 2005). Selain itu, kualitas sumber daya manusia aparatur, termasuk kompetensi teknis, literasi digital, dan kemampuan kolaboratif,

sangat menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan inovasi secara berkelanjutan (Mulgan & Albury, 2003).

Dari sisi organisasi, budaya birokrasi yang terbuka, fleksibel, dan kolaboratif berperan penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif. De Vries, Bekkers, dan Tummers (2016) dalam kajian meta-analisisnya menegaskan bahwa inovasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi seperti dukungan manajemen puncak, komunikasi internal, serta adanya mekanisme pembelajaran organisasi.

Sementara itu, faktor eksternal seperti regulasi, kebijakan pemerintah pusat, serta tekanan lingkungan sosial-ekonomi juga menjadi pendorong penting dalam mendorong inovasi daerah. Dalam konteks Indonesia, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dokumen kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI, 2020).

Lebih lanjut, kolaborasi multipihak atau konsep *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat lahirnya inovasi daerah (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Sinergi antar aktor ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas inovasi daerah secara lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel turut menjadi faktor eksternal yang mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi (Bappenas, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi daerah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi faktor kepemimpinan, sumber daya manusia, budaya organisasi, dukungan regulasi, kolaborasi multipihak, serta tekanan lingkungan

eksternal. Keseimbangan dan sinergi antar faktor tersebut menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan implementasi inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

### **2.3.3 Hambatan dan Tantangan Inovasi Daerah**

Meskipun inovasi daerah terus berkembang, berbagai hambatan masih dihadapi dalam praktiknya. Jurnal Transformasi Administrasi (2022) mencatat bahwa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan inovasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-OPD dan budaya birokrasi yang masih cenderung administratif membuat inovasi sulit diimplementasikan secara optimal. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan inovasi, di mana banyak program yang berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem evaluasi yang mampu menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses dan konteks pelaksanaan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Berbagai literatur akademik menunjukkan bahwa hambatan inovasi daerah merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, kompleks, dan saling berkelindan antara faktor kelembagaan, sumber daya, teknologi, hingga aspek sosial-politik dalam pemerintahan daerah. Secara konseptual, inovasi sektor publik sering terhambat oleh karakteristik birokrasi yang cenderung hierarkis, prosedural, dan berorientasi pada kepatuhan aturan (*rule-based organization*), yang dalam banyak kasus mengurangi fleksibilitas aparatur dalam mengambil keputusan inovatif (Damanpour, 1991; Osborne & Brown, 2013).

Dari perspektif sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi aparatur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan inovasi daerah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, kurangnya kemampuan manajerial, serta terbatasnya pelatihan inovasi menyebabkan implementasi inovasi tidak berjalan optimal dan cenderung

bersifat formalitas (Mulgan & Albury, 2003; de Vries, Bekkers, & Tummers, 2016). Selain itu, fenomena *resistance to change* atau resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan signifikan, di mana aparatur cenderung mempertahankan cara kerja lama karena dianggap lebih aman dan minim risiko dibandingkan mencoba pendekatan baru yang belum teruji.

Hambatan lain juga berasal dari aspek regulasi dan kebijakan. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, tumpang tindih peraturan, serta kurangnya fleksibilitas regulasi sering kali menghambat ruang gerak inovasi di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, meskipun desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah, pada praktiknya banyak daerah masih terikat oleh regulasi sektoral yang ketat sehingga mengurangi ruang eksperimen kebijakan (LAN RI, 2020; Bappenas, 2021). Kondisi ini diperparah dengan adanya prosedur penganggaran yang rigid, sehingga inovasi sering terkendala pada tahap pendanaan dan keberlanjutan program.

Dari sisi infrastruktur, ketimpangan digital (*digital divide*) juga menjadi hambatan serius dalam inovasi daerah. Daerah dengan akses teknologi yang terbatas cenderung tertinggal dalam mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital dibandingkan daerah perkotaan. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet yang tidak merata, serta minimnya integrasi sistem data antarinstansi memperlemah efektivitas implementasi inovasi berbasis digital (Afdilati, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik.

Selain faktor struktural, hambatan inovasi juga muncul dari aspek budaya organisasi dan sosial masyarakat. Budaya birokrasi yang masih konservatif, rendahnya budaya kolaborasi, serta minimnya orientasi pada kinerja inovatif menyebabkan inovasi tidak berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya literasi publik

terhadap layanan inovatif juga menjadi tantangan tersendiri, karena inovasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan dukungan dan penerimaan pengguna sebagai bagian dari keberhasilannya (Suwarno, 2008).

Lebih lanjut, dalam perspektif ekosistem inovasi, lemahnya koordinasi antaraktor dalam model *quadruple helix* (pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat) juga menjadi hambatan penting. Ketidakharmisan kolaborasi ini menyebabkan inovasi tidak berkembang secara sistemik, melainkan berjalan parsial dan sektoral (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Selain itu, rendahnya dukungan politik (*political will*) dari pimpinan daerah juga sering menjadi faktor penghambat karena inovasi membutuhkan komitmen jangka panjang, sementara perubahan kepemimpinan sering menyebabkan perubahan prioritas kebijakan.

Hambatan lainnya adalah lemahnya sistem evaluasi, monitoring, dan keberlanjutan inovasi. Banyak inovasi daerah yang hanya berjalan pada tahap awal implementasi namun tidak berkembang karena tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur dampak dan efektivitasnya (Torugsa & Arundel, 2016). Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi kendala umum, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga inovasi sering tidak dapat dikembangkan secara optimal atau hanya bersifat proyek jangka pendek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan inovasi daerah merupakan kombinasi dari faktor internal seperti birokrasi yang kaku, keterbatasan SDM, budaya organisasi, dan lemahnya evaluasi, serta faktor eksternal seperti regulasi yang tidak fleksibel, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan teknologi, serta rendahnya kolaborasi antaraktor. Kompleksitas hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan ide atau kebijakan, tetapi juga pada kemampuan sistem pemerintahan daerah dalam menciptakan ekosistem inovasi yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoretis

Kerangka berpikir merupakan salah satu elemen fundamental dalam penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan logis dalam menyusun alur pemikiran secara sistematis dan terstruktur. Menurut Addini et al. (2021), kerangka berpikir adalah konstruksi konseptual yang memuat integrasi antara teori, fakta empiris, hasil observasi, serta kajian pustaka yang relevan sebagai dasar dalam memahami dan menjelaskan suatu fenomena penelitian. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2017:92 dalam Elibrary UNIKOM) menyatakan bahwa kerangka berpikir berfungsi untuk membangun alur penelitian yang logis, rasional, dan sistematis sehingga hubungan antar konsep atau variabel dapat dijelaskan secara jelas dan terarah. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis penelitian, tetapi juga sebagai instrumen intelektual yang memastikan penelitian berjalan secara ilmiah, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kerangka berpikir dalam literatur metodologi penelitian juga dipahami sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan teori dengan realitas empiris di lapangan. Kerangka ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menghubungkan konsep-konsep utama sehingga membentuk suatu alur pemikiran yang utuh dan sistematis (Grant & Osanloo, 2014). Selain itu, kerangka berpikir juga berfungsi untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam suatu penelitian, baik hubungan kausal, korelasional, maupun interaktif, sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan fokus analisis serta arah penelitian secara keseluruhan (Wardhana et al., 2015).

Lebih lanjut, kerangka berpikir juga berkaitan erat dengan kerangka berpikir teoritis (*theoretical framework*), yaitu seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan suatu fenomena penelitian secara mendalam (Imenda, 2014; Corbin & Strauss, 2015). Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar ilmiah yang digunakan untuk menganalisis data serta memberikan arah dalam memahami

hubungan antar konsep yang diteliti. Dengan demikian, kerangka teoritis tidak hanya menjelaskan teori yang digunakan, tetapi juga bagaimana teori tersebut diaplikasikan dalam konteks penelitian tertentu agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian.

Dalam praktik penelitian, kerangka berpikir dan kerangka teoritis memiliki peran penting dalam menyederhanakan kompleksitas fenomena yang diteliti. Melalui kerangka ini, peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel utama, menghubungkannya dengan teori yang relevan, serta menyusun alur logika penelitian yang sistematis dan mudah dipahami. Kerangka berpikir juga sering divisualisasikan dalam bentuk diagram atau bagan untuk memperjelas hubungan antar konsep yang diteliti, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami arah penelitian secara keseluruhan (Saputra, 2021; Ramadhan, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pikir disusun untuk menjelaskan keterkaitan logis antara fenomena peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung pada periode 2023–2024 dengan strategi implementasi inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida). Peningkatan skor IID tersebut secara empiris menunjukkan adanya kemajuan dalam kapasitas inovasi daerah dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong inovasi sektor publik. Namun demikian, capaian tersebut tidak dapat hanya dipahami sebagai hasil numerik, melainkan perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana strategi yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan inovasi daerah serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971) sebagai kerangka analisis utama. Model ini dipilih karena memiliki pendekatan evaluatif yang komprehensif, sistematis, dan holistik, sehingga mampu menilai suatu program atau kebijakan dari berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir yang dicapai. Model CIPP dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. **Context (Konteks):** menganalisis latar belakang, kebutuhan daerah, arah kebijakan, serta kesesuaian strategi inovasi dengan visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung.
2. **Input (Masukan):** menilai kesiapan sumber daya seperti anggaran, kualitas SDM, dukungan kelembagaan, sarana prasarana, serta perencanaan strategi inovasi yang digunakan Bapperida.
3. **Process (Proses):** mengevaluasi implementasi strategi inovasi, termasuk mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarperangkat daerah, komunikasi organisasi, serta hambatan yang muncul selama proses berlangsung.
4. **Product (Produk/Hasil):** menilai output dan outcome berupa peningkatan skor IID, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta dampak inovasi terhadap masyarakat.

Setelah keempat komponen CIPP dianalisis, dilakukan tahap analisis komprehensif untuk melihat efektivitas strategi inovasi yang dijalankan oleh Bapperida. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan hasil dari setiap komponen sehingga dapat diketahui keterkaitan antara konteks, input, proses, dan hasil. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan inovasi serta faktor penghambat yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan.

Tahap akhir dari kerangka pikir ini adalah penarikan kesimpulan berupa output penelitian yang mencakup temuan evaluasi efektivitas strategi Bapperida dalam meningkatkan inovasi daerah serta rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penguatan strategi inovasi daerah agar lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

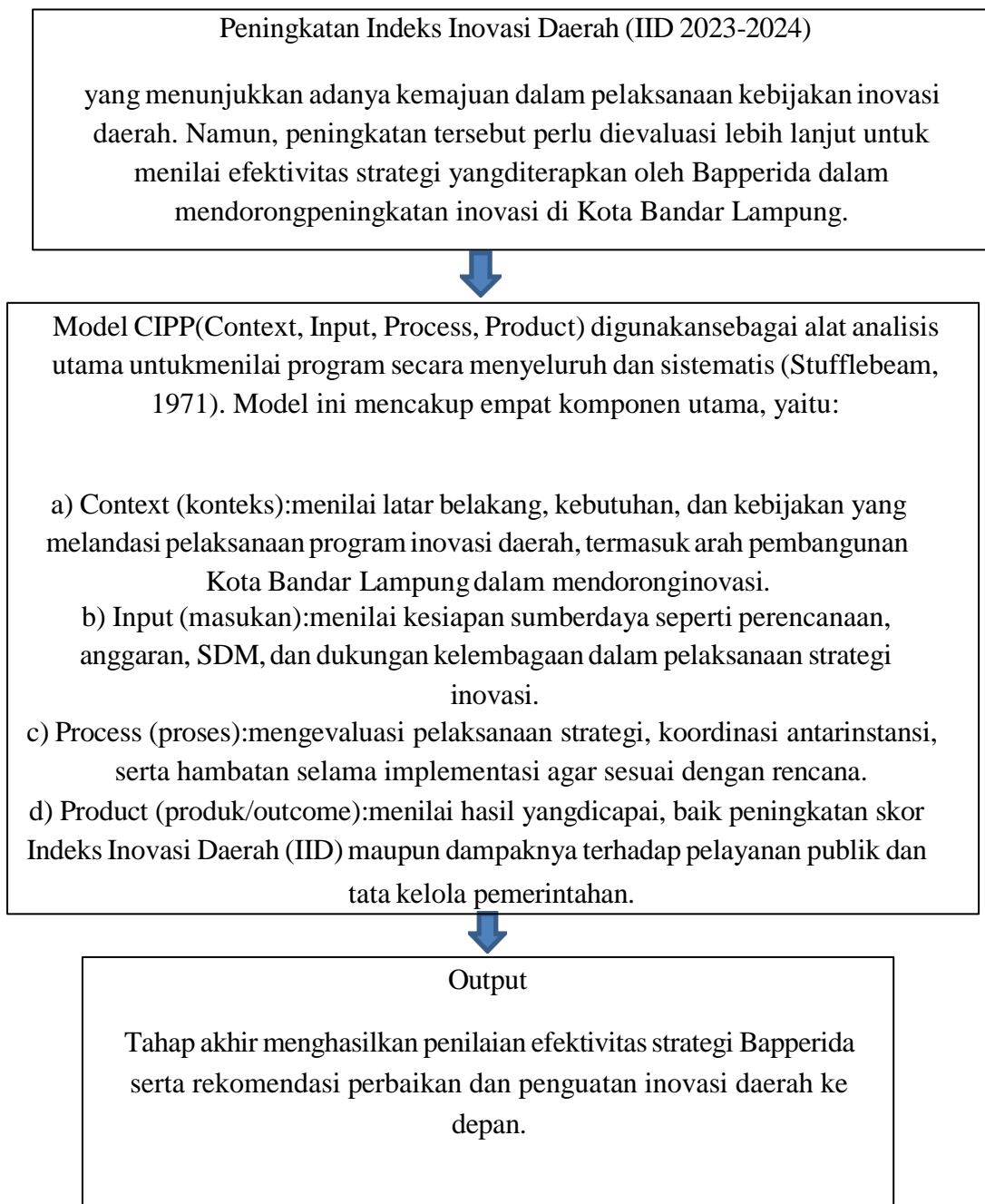
Kerangka pikir ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk bagan alur yang menggambarkan hubungan sistematis antara fenomena peningkatan IID, penerapan model CIPP, proses analisis, hingga menghasilkan output penelitian berupa temuan dan rekomendasi. Alur penelitian dimulai dari fenomena empiris peningkatan IID Kota Bandar Lampung, kemudian dianalisis menggunakan

pendekatan CIPP (context, input, process, product), dilanjutkan dengan analisis efektivitas strategi Bapperida, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan. Dengan alur tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan secara komprehensif bahwa peningkatan inovasi daerah dipengaruhi oleh kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, kualitas proses implementasi, serta hasil yang dicapai.

Selain itu, setiap komponen dalam model CIPP dioperasionalkan ke dalam indikator evaluatif yang lebih terukur, yaitu:

1. **Indikator Context:** kesesuaian kebijakan inovasi dengan RPJMD, relevansi program dengan kebutuhan daerah, serta dukungan regulasi.
2. **Indikator Input:** kecukupan anggaran, kompetensi SDM aparatur, ketersediaan sarana prasarana, dan dukungan kelembagaan.
3. **Indikator Process:** efektivitas pelaksanaan strategi, koordinasi antarperangkat daerah, partisipasi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
4. **Indikator Product/Outcome:** peningkatan skor IID, peningkatan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta penguatan kapasitas inovasi daerah secara berkelanjutan.

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Hasil penelitian tidak hanya menggambarkan efektivitas kinerja Bapperida dalam peningkatan inovasi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan inovasi daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.



Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

*Disusun oleh Penulis, 2025.*

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024 merupakan hasil dari interaksi dinamis antara konteks kebijakan, ketersediaan input, efektivitas proses pelaksanaan, dan keluaran atau outcome yang dihasilkan. Melalui penerapan model evaluasi CIPP, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana strategi yang dijalankan oleh Bapperida telah berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan inovasi daerah. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan program, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk rekomendasi penguatan kebijakan dan strategi inovasi daerah di masa mendatang.

### **III .METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan hasil evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung tahun 2023– 2024.

Menurut Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari pandangan partisipan terhadap suatu fenomena sosial atau kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menggali secara komprehensif bagaimana pelaksanaan program peningkatan IID dijalankan serta bagaimana efektivitasnya jika dilihat melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan peningkatan IID berdasarkan tiga komponen utama instrumen evaluasi Kementerian Dalam Negeri (input, proses, dan output). Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan model evaluasi CIPP, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang keselarasan pelaksanaan program dengan tujuan peningkatan inovasi daerah.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam studi ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung. Bapperida merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, penguatan riset, serta pengelolaan inovasi daerah, termasuk dalam proses peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung

tahun 2023–2024. Dalam pelaksanaan program IID, Bapperida berperan sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data inovasi, pelaksanaan verifikasi, pendampingan perangkat daerah, penyusunan dokumen pendukung, hingga pelaporan capaian IID kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemilihan Bapperida sebagai subjek penelitian didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut dalam keseluruhan proses pengelolaan inovasi daerah di Kota Bandar Lampung. Bapperida tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga menjadi aktor utama dalam penyusunan strategi peningkatan IID, pengendalian mutu inovasi daerah, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam memenuhi indikator penilaian inovasi nasional. Dengan demikian, Bapperida menjadi institusi yang paling relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung.

Adapun objek penelitian dalam studi ini adalah Program Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024. Program IID merupakan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi daerah di berbagai sektor pemerintahan. Indeks Inovasi Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas pelayanan publik, serta kemampuan daerah dalam membangun daya saing dan reformasi birokrasi berbasis inovasi.

Pemilihan Program IID sebagai objek penelitian didasarkan pada urgensi program tersebut dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program IID tidak hanya menilai jumlah inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah, tetapi juga menekankan kualitas, keberlanjutan, kematangan inovasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program IID menjadi penting untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaan program peningkatan inovasi daerah di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan tujuan, pedoman, dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan evaluasi Program Indeks Inovasi Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperida Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji aspek kebijakan dan kebutuhan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan program, hingga hasil atau capaian IID yang diperoleh Kota Bandar Lampung selama periode 2023–2024.

Dengan penentuan subjek dan objek penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Program Indeks Inovasi Daerah di Kota Bandar Lampung, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, sumber daya, proses implementasi, maupun hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan inovasi daerah.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bapperida Kota Bandar Lampung, yang memiliki peran penting dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi inovasi daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi lembaga dengan tujuan penelitian, kemudahan akses data, serta keterlibatan langsung Bapperida dalam pengelolaan IID. Selain itu, peneliti juga pernah melaksanakan PKL di Bapperida, sehingga memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur dan kegiatan inovasi di lembaga tersebut. Fokus penelitian berada pada periode 2023–2024, sehingga pengumpulan data difokuskan pada dokumen, laporan, dan kegiatan inovasi selama dua tahun tersebut untuk menilai sejauh mana strategi peningkatan IID telah berjalan secara nyata.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) di Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program peningkatan IID yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis indikator-indikator yang berpengaruh terhadap capaian inovasi daerah, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi program peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) menggunakan model CIPP untuk menilai keselarasan kebijakan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan program, dan capaian hasil inovasi. Fokus kajian mencakup:

Context, akan menilai kesesuaian kebijakan inovasi Bapperida dengan kebutuhan dan arah pembangunan Kota Bandar Lampung.

Input, akan menilai kesiapan sumber daya program, termasuk perencanaan, anggaran, SDM, sarana, dan dukungan kelembagaan.

Process, akan menilai efektivitas pelaksanaan program, koordinasi, mekanisme implementasi, serta hambatan yang terjadi.

Product, akan menilai capaian program berupa peningkatan skor IID dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan proses pelaksanaan peningkatan IID, tetapi juga menilai efektivitas dan relevansi program tersebut terhadap hasil yang diharapkan, berdasarkan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

### **3.5 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), purposive sampling digunakan apabila peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung terhadap fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan data yang lebih mendalam dan relevan. Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat Pratiwi dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa purposive sampling memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya karena informan dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, serta keterlibatannya terhadap objek penelitian.

Penggunaan teknik purposive sampling dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024. Oleh karena itu, informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, verifikasi, hingga evaluasi program IID. Pemilihan informan juga mempertimbangkan kemampuan informan dalam menjelaskan kondisi faktual terkait kebijakan inovasi daerah, mekanisme penginputan inovasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta implementasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

, informan penelitian terdiri atas Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, staf pengelola IID di lingkungan Bapperida, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana inovasi unggulan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Puskesmas Gedong Air.

Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya berasal dari sudut pandang pengelola kebijakan, tetapi juga dari pelaksana inovasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif, menyeluruh, dan mendalam mengenai evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product).

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama/Jabatan/ Instansi	Peran dalam Penelitian	Alasan Pemilihan sebagai Informan
1	Evi Rahmalia S.Pi.,M.Si./Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida	Informan teknis utama	Karna berperan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di seluruh aspek pemerintahan, ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur daerah. Kepala bidang ini merupakan pelaksana teknis inti yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan pengembangan inovasi daerah dan pelaporan capaian iid. Oleh karena itu, ia menjadi informan utama dalam menilai aspek process dan product Pada model cipp, yaitu pelaksanaan inovasi dan hasilnya.
2	Viena Christy Margarena/Staf Pengelola Inovasi Daerah Bapperida	Informan pelaksana teknis	Bertugas secara teknis dalam pelaksanaan, pengumpulan data, dan pelaporan kegiatan inovasi daerah. Mereka merupakan pelaksana langsung kegiatan di lapangan, sehingga menjadi sumber data primer dalam memahami dinamika implementasi inovasi, kendala teknis, serta capaian aktual dari kegiatan peningkatan iid relevan untuk menilai komponen process dan product.
3	Ika Dessy/ Operator inovasi Puskesmas Gedong Air	Informan Pelaksana	Wawancara dengan operator inovasi di Puskesmas dilakukan karena operator merupakan pihak yang

---

		terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi layanan kesehatan kepada masyarakat. Operator memiliki pengalaman empiris terkait pelaksanaan program di lapangan, termasuk hambatan teknis maupun administratif yang dihadapi. Data yang diperoleh dari operator ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan inovasi serta dampak yang dihasilkan, terutama dalam aspek process dan product pada model evaluasi CIPP.
4. Hadi/ Operator Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Informan Pelaksana Teknis	Wawancara dengan operator inovasi di Dinas Pendidikan dilakukan karena operator merupakan pelaksana teknis yang secara langsung mengelola dan menjalankan inovasi di sektor pendidikan. Operator memiliki pemahaman yang mendalam terkait mekanisme sistem, proses pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi selama implementasi inovasi.

---

Sumber: Disusun oleh penulis

### 3.6 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat naratif dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) di Bapperida Kota Bandar Lampung. Menurut Sugiyono (2017), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, pernyataan, dan tindakan yang

menggambarkan makna suatu fenomena secara menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan inovasi daerah. Informan utama meliputi Kepala Bapperida, Kepala Bidang Riset dan Inovasi, staf pengelola IID, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti pedoman IID, laporan tahunan Bapperida, regulasi daerah, hasil evaluasi Kemendagri, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis.

Kombinasi antara data primer dan sekunder digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif dan memperkuat validitas hasil penelitian (Creswell, 2014).

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi kualitatif. Kedua teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif, autentik, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

#### **1. Wawancara mendalam (in-depth interview)**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan kunci yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi peningkatan IID di Bapperida Kota Bandar Lampung. Teknik wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel, dengan panduan pertanyaan yang mengacu pada komponen model evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi terkait kebijakan, strategi pelaksanaan, kendala, serta hasil yang dicapai dalam peningkatan IID.

## 2. Observasi kualitatif

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas, situasi, dan interaksi dalam pelaksanaan program peningkatan IID. Observasi ini membantu memperkuat data hasil wawancara dengan bukti empiris di lapangan, seperti mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, partisipasi pemangku kepentingan, serta kondisi sumber daya dan sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan inovasi daerah.

Kedua teknik pengumpulan data tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menilai keterpaduan antara komponen konteks, input, proses, dan produk sesuai model evaluasi CIPP.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini dipilih karena mampu memberikan alur analisis yang sistematis dan bersifat berulang (*cyclical*), sehingga peneliti dapat meninjau ulang hasil sementara untuk memastikan kedalaman makna data.

Tahapan analisis data meliputi:

**Pengumpulan Data**, yaitu menghimpun data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua hasil wawancara direkam (dengan izin informan) dan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keaslian data.

**Reduksi Data**, yakni proses penyederhanaan dan seleksi data untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dikelompokkan dalam beberapa tema seperti strategi kelembagaan, digitalisasi layanan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar-OPD.

**Penyajian Data**, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar hubungan antarvariabel dapat terlihat jelas.

**Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**, yaitu menafsirkan makna data berdasarkan

pola dan tema yang muncul. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi dan *member checking* untuk memastikan keakuratan interpretasi.

### **3.9 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan prinsip validitas, reliabilitas, dan kredibilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) dan Sugiyono (2017). Teknik yang digunakan adalah triangulasi, yaitu metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi Sumber, dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti pejabat Bapperida, staf pelaksana, dan perwakilan OPD mitra untuk memastikan konsistensi data.

Triangulasi Teknik, dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh data yang saling melengkapi.

## V.SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung periode 2023–2024 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), dapat disimpulkan bahwa peningkatan capaian IID Kota Bandar Lampung merupakan hasil dari proses perbaikan yang terjadi secara terintegrasi antar komponen evaluasi.

Pada komponen context, pemerintah daerah telah melakukan perubahan arah kebijakan pengelolaan inovasi dari orientasi kuantitas menuju kualitas inovasi. Perubahan tersebut dilakukan setelah evaluasi tahun 2023 menunjukkan bahwa banyaknya inovasi yang dilaporkan belum mampu menghasilkan nilai IID yang optimal karena sebagian inovasi masih memiliki tingkat kematangan rendah. Perubahan pemahaman terhadap mekanisme penilaian IID menjadi dasar dalam penyesuaian strategi peningkatan inovasi daerah.

Pada komponen input, pemerintah daerah melakukan penguatan mekanisme seleksi dan verifikasi inovasi melalui quality control yang lebih ketat sebelum inovasi dikirim ke sistem nasional. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Inovasi Kota Bandar Lampung (Sinovak) membantu proses pengelolaan inovasi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, pemerataan kapasitas perangkat daerah, stabilitas operator inovasi, serta kualitas dokumentasi inovasi.

Pada komponen process, proses pengelolaan inovasi daerah mengalami peningkatan melalui verifikasi berbasis indikator IID, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyelarasan inovasi dengan indikator pelayanan dasar nasional. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan seperti belum optimalnya integrasi layanan inovasi antarperangkat daerah, kualitas dokumentasi

inovasi yang belum merata, serta rendahnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap indikator penilaian IID.

Pada komponen product, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor IID Kota Bandar Lampung dari 70,33 pada tahun 2023 menjadi 72,07 pada tahun 2024. Akan tetapi, peningkatan skor tersebut belum mampu meningkatkan posisi peringkat nasional karena Kota Bandar Lampung mengalami penurunan peringkat dari posisi 6 menjadi posisi 13. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan inovasi daerah belum sepenuhnya menghasilkan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Berdasarkan analisis proporsional indikator IID dalam model CIPP, komponen Input memiliki proporsi terbesar sebesar 32,26%, diikuti Process sebesar 29,03%, sedangkan Context dan Product masing-masing sebesar 19,35%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan IID sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, kualitas tata kelola inovasi, efektivitas pelaksanaan inovasi, serta kualitas hasil inovasi daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan IID Kota Bandar Lampung telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, integrasi layanan digital, kualitas implementasi inovasi, dokumentasi inovasi, serta peningkatan kemanfaatan dan replikasi inovasi agar Kota Bandar Lampung mampu meningkatkan skor sekaligus memperbaiki posisi peringkat IID pada tingkat nasional.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan inovasi daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Selain itu, diperlukan pemerataan budaya inovasi pada

seluruh organisasi perangkat daerah agar pengembangan inovasi tidak hanya terpusat pada perangkat daerah tertentu, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tata kelola inovasi melalui penguatan sistem verifikasi, monitoring, dan dokumentasi inovasi yang lebih terintegrasi dan berbasis digital. Pengembangan Sistem Informasi Inovasi Kota Bandar Lampung (Sinovak) perlu dioptimalkan sebagai sarana integrasi layanan inovasi, pengendalian mutu inovasi, serta pengelolaan data dan bukti dukung inovasi secara lebih sistematis, akurat, dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengarahkan pengembangan inovasi daerah pada inovasi yang memiliki tingkat kematangan tinggi, berdampak nyata terhadap pelayanan publik, memiliki cakupan penerima manfaat yang luas, serta berpotensi direplikasi oleh daerah lain. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing inovasi daerah sehingga Kota Bandar Lampung tidak hanya mampu meningkatkan skor IID, tetapi juga memperbaiki posisi peringkat pada tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addini, A., et al. (2021). *Kerangka berpikir dalam penelitian: Konsep dan implementasi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Penelitian.
- Afdilati, A. (2025). *Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik di Indonesia*. ResearchGate.
- Ali, M., et al. (2009). *Managing innovation and technology in developing countries*. World Scientific Publishing.
- Aprianty, H. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 179–192.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aswin, I. G. P., & Sofyan, A. (2022). Dinamika pelaksanaan electronic governance pemerintahan daerah di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 116–130.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government (Studi Deskriptif tentang Aplikasi Ogan Lapian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Politikom Indonesia*, 3(1), 65–78.
- Bahtiar, M., Nurdin, N., & Manda, D. (2021). Digital governance: Solusi menghadapi birokrasi di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(1), 106–121.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (2020). *Roadmap Sistem Inovasi Daerah 2020–2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. (2025). *Bappeda Provinsi Lampung Raih Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dalam Peringatan HUT RI ke-80*. <https://bappeda.lampungprov.go.id>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Naik peringkat 54 di Global Innovation Index, BRIN terima rekor MURI*. <https://brin.go.id/press->

[release/122140/naik-peringkat-54-di-global-innovation-index-brin-terima-rekor-muri](https://brin.go.id/release/122140/naik-peringkat-54-di-global-innovation-index-brin-terima-rekor-muri)

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Informasi Inovasi Daerah*. <https://brin.go.id>
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). (2022). *Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). (2023). *Laporan Indeks Inovasi Daerah 2023*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). (2024). *Data Inovasi Daerah Platform Indeks Inovasi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). (2024). *Laporan Indeks Inovasi Daerah 2024*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Bappenas. (2021). *Transformasi digital dan inovasi pelayanan publik di Indonesia*.
- Basyah, A. (2019). Evaluasi program dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 36–47.
- Batoebara, M. U. (2021). Inovasi dan kolaborasi dalam era komunikasi digital. *Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa*.
- Budiman, S., Kurniadi, D., Matridi, R. A., Jenawi, B., & Junriana. (2021). Analisa pemetaan hasil inovasi daerah Kabupaten Bintan pada penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. *Indonesian Governance Journal*, 4(2).
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 34(3), 555–590.
- Darodjat, & Wahyudhiana. (2015). *Evaluasi program pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- de Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector. *Public Administration*, 94(1), 146–166.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. (2025). *Laporan skor Indeks Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung 2024*.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Sistem Inovasi Daerah dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Fatoni, A. (2022). *A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Perubahan*. Jakarta: Expose.
- Fitriani, R., & Wahyudi, A. (2020). Kerangka konseptual dalam analisis kebijakan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 33–44.
- GoodStats. (2024). *Indeks inovasi Indonesia meningkat di kancah global*. <https://data.goodstats.id/statistic/indeks-inovasi-indonesia-meningkat-di-kancah-global-el3qH>
- Grant, C., & Osanloo, A. (2014). Understanding theoretical framework. *The Qualitative Report*, 19(50), 1–21.
- Guntur. (2019). A conceptual framework for qualitative research. *International Journal of Qualitative Research*, 4(3), 12–20.
- Hartley, J. (2005). Innovation in governance. *Public Money & Management*, 25(1), 27–34.
- Hendrayady. (2020). Inovasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *KEMUDI*, 4(2), 174–199.
- Hidayat, A. (2025). Evaluasi pelaporan inovasi daerah Kota Padang tahun 2024. *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi Daerah*, 7(1), 55–68.
- Hidayat, R. (2019). Inovasi daerah dalam peningkatan daya saing. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 115–124.
- Ika, A. (2024). Kajian inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Klik Pelalawan. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Daerah*, 4(1), 20–35.
- Imenda, S. (2014). Conceptual frameworks. *Journal of Social Sciences*, 38(2), 185–195.
- Jurnal Nusantara. (2024). *Analisis indeks inovasi global dan daya saing negara berkembang*. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18860>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA)*.

- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman penilaian Indeks Inovasi Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Laporan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021*.
- KemenPANRB. (2010). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- KemenPANRB. (2014). *PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2014*.
- KK Advocates. (2024). *Indonesia's 2024 Global Innovation Index increased forward*. <https://www.kk-advocates.com/news/read/indonesias-2024-global-innovation-index-increased-forward>
- Kurniawan, A. (2017). Inovasi pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justisia*, 11(3), 201–216.
- LAN RI. (2020). *Kebijakan inovasi sektor publik di Indonesia*.
- Maninggar, A., Santoso, E. B., & Leksono, A. S. (2023). Model pengukuran implementasi Sistem Inovasi Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(2), 139–155.
- Maulida, A. N., & Lestari, R. A. (2024). Regional innovation as a catalyst for economic growth. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 45–58.
- Media Indonesia. (2024). *BRIN banggakan capaian Global Innovation Index*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/737038>
- Menteri Dalam Negeri RI. (2023). *Kepmendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023*.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2024). *Kepmendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubakkirah, P. (2022). *Skripsi evaluasi program pembelajaran blended learning*.
- Narti, D., & Jamal, K. (2022). Pengembangan inovasi daerah. *Jurnal Publica*, 9(3), 101–112.

- Nasripani, N., Hendrayani, H., & Malina, M. (2023). Strategi Bappedalitbang dalam inovasi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 101–120.
- Nurhayati, E., & Alfiansyah, R. (2021). Kerangka konseptual dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 5(2), 76–88.
- Osborne, S. P., & Brown, L. (2013). *Handbook of innovation in public services*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik berbasis TI*.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Perwali No. 2 Tahun 2024*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). *Indeks Inovasi Daerah*.
- Prabowo, H. (2023). Inovasi pelayanan pada organisasi publik. *Jurnal Wacana Kinerja*, 26(1), 102–106.
- Pratama, R. (2024). Dampak sosial inovasi layanan kesehatan di Lampung Selatan. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Daerah*, 6(2), 102–115.
- Rahman, M., Irianto, G., & Rosidi. (2023). Evaluasi implementasi e-budgeting dengan model CIPP di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*.
- Rahmanda, F. (2023). Kapasitas kelembagaan Bappeda Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 1–18.
- Ravitch, S. M., & Riggan, M. (2017). *Reason and Rigor*. Sage Publications.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sari, D. P. (2021). Inovasi daerah dalam pelayanan publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 13–28.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus*. Sage Publications.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business*. Wiley.
- Sinurat, M., & Sumanti, L. (2017). Inovasi pelayanan publik di daerah. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 7(1), 89–112.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *CIPP model*.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The relevance of the CIPP evaluation model. *Journal of Research and Development in Education*, 5(1), 19–25.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2015). *Evaluasi program dan kebijakan*. Raja Grafindo Persada.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*.
- Taufik, T. A. (2005). *Pengembangan sistem inovasi daerah*. BPPT.
- Thoha, M. (2003). *Manajemen evaluasi*. Rajawali Pers.
- Tim Peneliti Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Faktor-faktor inovasi di Kota Surakarta*.
- Tim Peneliti Jurnal Transformasi Administrasi. (2022). *Tata kelola inovasi daerah di Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014.
- Undiksha. (2022). *Evaluasi program CIPP SMA Negeri 2 Mengwi*.
- Universitas Ciputra Library. (n.d.).
- Universitas Ciputra. (2025). *Indeks Inovasi Daerah*.
- Universitas Sofifi. (2025). *Exploring Universitas Ciputra*.
- Wahyuni, S. (2016). *Skripsi inovasi*.
- Wibowo, T. (2021). *Inovasi pelayanan publik era informasi*.
- Wirawan, I. G. (2011). *Evaluasi kinerja organisasi publik*.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori dan aplikasi*.
- World Intellectual Property Organization. (2024). *Global Innovation Index 2024: Indonesia*.
- Wulandari, S. (2023). *Kendala inovasi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap*.
- Yuliani, D., & Firmansyah, R. (2024). *Fluktuasi skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang*.